



KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA INDONESIA

POSITION OF VISUM ET REPERTUM AS EVIDENCE IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW EVIDENCE SYSTEM

Tri Wani Andini¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: angelinadinda008@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 07-07-2025

Revised : 08-07-2025

Accepted : 10-07-2025

Published : 13-07-2025

Abstract

Visum et repertum plays a crucial role in the criminal justice system of Indonesia, especially in cases involving physical and sexual violence. As a valid documentary evidence, visum et repertum serves to provide objective proof of the victim's condition, both physically and psychologically. However, the use of visum et repertum in criminal proceedings in Indonesia faces several challenges, such as the quality of medical reports, delays in issuing the visum, differing interpretations among medical practitioners, and potential misuse. This research aims to examine the position of visum et repertum in the criminal evidence system in Indonesia, as well as the challenges faced in its application. The study's findings indicate that although visum et repertum holds a strong position as evidence, these challenges must be addressed through improving the quality of medical practitioners, strict supervision of the visum preparation process, and enhancing the understanding of law enforcement authorities.

Keywords: *Visum et repertum, evidence, criminal law*

Abstrak

Visum et repertum memegang peranan penting dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, khususnya dalam perkara yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual. Sebagai alat bukti surat yang sah, visum et repertum berfungsi untuk memberikan bukti objektif tentang keadaan korban yang diperiksa secara medis, baik dari aspek fisik maupun psikologis. Namun, penggunaan visum et repertum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti kualitas laporan medis, keterlambatan pengeluaran visum, interpretasi yang berbeda antar tenaga medis, serta potensi penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan visum et repertum dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun visum et repertum memiliki kedudukan yang kuat sebagai alat bukti, tantangan-tantangan tersebut harus diatasi dengan peningkatan kualitas tenaga medis, pengawasan ketat terhadap prosedur pembuatan visum, serta peningkatan pemahaman oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: *Visum et repertum, alat bukti, hukum pidana*

PENDAHULUAN

Visum et repertum adalah alat bukti yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), visum et repertum berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi fisik atau psikologis korban tindak pidana. Dokumen ini disusun oleh seorang tenaga medis yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atau obyek yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, dan biasanya berupa laporan hasil pemeriksaan medis yang mencakup kondisi fisik, luka-



luka, atau kemungkinan dampak dari suatu peristiwa kriminal. Visum et repertum tidak hanya memberikan bukti atas kejahatan yang dilakukan, tetapi juga membantu mengidentifikasi tingkat keseriusan dari tindak pidana tersebut (Djamaluddin, 2018). Oleh karena itu, visum et repertum memiliki peran sentral dalam membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau seksual.

Dalam konteks hukum Indonesia, visum et repertum diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa visum et repertum termasuk dalam kategori bukti surat, yang merupakan salah satu dari beberapa jenis bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu perkara pidana di pengadilan. Sebagai alat bukti yang berfungsi memberikan penjelasan medis yang obyektif, visum et repertum sering kali dijadikan dasar bagi hakim untuk memutuskan apakah suatu tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan sejauh mana kerugian yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, kedudukan visum et repertum dalam pembuktian hukum pidana sangat penting, mengingat perannya yang memberikan bukti yang lebih kuat mengenai kerusakan atau dampak yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana.

Namun demikian, meskipun visum et repertum memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sistem pembuktian hukum pidana, penggunaannya sering kali menemui sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan kualitas dan keandalan laporan medis yang dibuat oleh tenaga medis. Sebagai alat bukti, visum et repertum harus disusun dengan menggunakan prosedur medis yang tepat, obyektif, dan tanpa adanya unsur subjektivitas atau kepentingan lain. Apabila tenaga medis dalam melakukan pemeriksaan atau menyusun laporan tidak memiliki keahlian yang memadai atau terlibat dalam bias, maka visum et repertum yang dihasilkan dapat dipertanyakan kredibilitasnya. Dalam beberapa kasus, kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan visum dapat berakibat fatal terhadap proses peradilan, bahkan dapat menyebabkan ketidakadilan, karena dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap suatu perkara pidana.

Tantangan lain yang terkait dengan penggunaan visum et repertum adalah proses interpretasi yang dapat bervariasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Dalam prakteknya, pihak terdakwa dan pihak korban dapat memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap isi dan kesimpulan yang terdapat dalam laporan visum. Misalnya, pihak terdakwa mungkin akan berusaha membantah temuan-temuan dalam visum dengan argumen bahwa luka yang dialami korban tidak berhubungan langsung dengan tindakan terdakwa, atau bahkan tidak disebabkan oleh tindak pidana sama sekali (Setiawan, 2019). Sebaliknya, pihak korban dan jaksa penuntut umum akan berusaha menekankan pentingnya visum sebagai bukti yang menguatkan dakwaan mereka. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi hakim untuk mampu menilai keabsahan dan objektivitas dari visum et repertum serta memberikan penilaian yang adil berdasarkan bukti-bukti lainnya yang ada.

Visum et repertum juga menghadapi tantangan dalam hal ketepatan waktu penyusunan laporan medis tersebut. Dalam beberapa kasus, visum yang dikeluarkan setelah jangka waktu tertentu sejak peristiwa pidana dapat menurunkan akurasi hasil pemeriksaan. Misalnya, dalam kasus kekerasan fisik atau perkosaan, kerusakan atau luka yang terjadi pada tubuh korban dapat hilang atau sembuh dalam waktu tertentu, sehingga akan lebih sulit bagi tenaga medis untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi korban. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang



berwenang untuk memastikan bahwa visum et repertum dikeluarkan segera setelah kejadian tindak pidana tersebut terjadi, agar dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Peranan visum et repertum menjadi semakin penting dengan berkembangnya jenis-jenis tindak pidana yang melibatkan kerusakan fisik atau psikologis pada korban. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, atau penganiayaan fisik sering kali mengandalkan visum et repertum sebagai bukti yang kuat dalam mendukung dakwaan. Dalam kasus kekerasan seksual, misalnya, visum et repertum tidak hanya menggambarkan luka fisik, tetapi juga bisa menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis yang dialami oleh korban. Dengan semakin banyaknya kasus yang memerlukan bukti medis yang objektif, visum et repertum diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memperkuat pembuktian di pengadilan. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa visum yang disusun oleh tenaga medis benar-benar akurat dan dapat diterima oleh pengadilan (Prasetyo, 2020).

Mengingat pentingnya visum et repertum dalam sistem pembuktian hukum pidana, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi tenaga medis yang bertanggung jawab dalam penyusunan visum. Hal ini akan memastikan bahwa laporan medis yang disusun tidak hanya akurat, tetapi juga memenuhi standar hukum yang berlaku. Selain itu, diperlukan juga peningkatan pemahaman di kalangan hakim dan aparat penegak hukum lainnya mengenai cara menilai visum et repertum dengan bijaksana, agar alat bukti ini dapat digunakan secara maksimal dalam pencarian keadilan. Dengan demikian, visum et repertum dapat benar-benar menjadi alat bukti yang sah dan objektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memastikan hak-hak korban tidak terabaikan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan visum et repertum dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan dalam penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti dalam praktik hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode ini akan menelaah peraturan-peraturan yang mengatur kedudukan visum et repertum sebagai alat bukti dalam proses pembuktian hukum pidana. Adapun sumber utama yang akan dianalisis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan terkait, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk



mengidentifikasi dan mengkaji dasar hukum yang mendasari pengakuan visum et repertum sebagai alat bukti sah, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana.

Selain itu, metode normatif juga akan digunakan untuk menilai kesesuaian antara teori hukum dan penerapannya dalam praktik. Penelitian ini akan membandingkan aturan-aturan yang ada dengan implementasi visum et repertum di pengadilan, untuk menemukan apakah terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang seharusnya berlaku dan praktik yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menganalisis teks hukum, tetapi juga memberikan pandangan kritis mengenai sejauh mana peraturan-peraturan yang ada mendukung penggunaan visum et repertum secara efektif dalam mencapai keadilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Di Indonesia

Visum et repertum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia, terutama karena fungsinya yang sangat relevan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, khususnya yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, visum et repertum diatur sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa alat bukti yang sah meliputi bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan pengakuan terdakwa. Visum et repertum digolongkan ke dalam bukti surat yang mencakup dokumen-dokumen yang memiliki nilai pembuktian dalam perkara pidana. Sebagai alat bukti surat, visum et repertum berfungsi untuk memberikan gambaran medis yang jelas tentang kondisi korban atau obyek yang diperiksa, baik dari segi fisik maupun psikologis (Utami, 2020).

Bukti ini memiliki nilai objektif yang tinggi karena disusun oleh tenaga medis yang memiliki keahlian di bidangnya, sehingga laporan yang diberikan dianggap lebih terlepas dari unsur subjektivitas dan kecenderungan pihak manapun. Kedudukan visum et repertum ini sangat krusial dalam perkara pidana yang melibatkan tindakan kekerasan atau tindak pidana yang mengakibatkan luka fisik, baik itu penganiayaan, pemerkosaan, atau bahkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus kekerasan fisik, misalnya, visum et repertum dapat menggambarkan luka-luka yang dialami oleh korban, menentukan tingkat keparahan luka tersebut, serta memberikan petunjuk mengenai apakah luka tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat langsung dari tindakan terdakwa. Oleh karena itu, visum et repertum berperan besar dalam membantu hakim dan pihak berwenang dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan.

Selain itu, visum et repertum juga berfungsi untuk menentukan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Sebagai contoh, dalam kasus perkosaan, visum et repertum tidak hanya berfokus pada luka fisik yang dialami oleh korban, tetapi juga bisa mencakup temuan-temuan yang mengarah pada adanya trauma psikologis yang diderita korban. Dengan demikian, visum et repertum tidak hanya berfungsi untuk memberikan bukti fisik, tetapi juga berperan dalam menggambarkan dampak jangka panjang yang dapat terjadi pada korban kejahatan, yang dalam banyak kasus bisa mempengaruhi putusan pengadilan, terutama dalam hal pemberian sanksi pidana yang tepat.



Namun, meskipun visum et repertum memiliki kedudukan yang sangat penting, penggunaannya dalam proses peradilan pidana di Indonesia tetap bergantung pada sejumlah faktor. Salah satu faktor utama adalah kredibilitas dari tenaga medis yang menyusun visum. Dalam hal ini, tenaga medis harus memiliki keahlian yang memadai dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal dalam melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan medis. Penggunaan visum et repertum yang tidak profesional atau bias bisa mengarah pada ketidakadilan, karena bisa saja informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta medis yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa visum et repertum tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dibutuhkan adanya regulasi yang ketat terkait dengan prosedur pembuatan visum dan tanggung jawab tenaga medis dalam hal ini (Mulyana, 2018).

Di samping itu, visum et repertum memiliki kedudukan yang sangat bergantung pada keberadaan saksi ahli yang dapat menguraikan laporan tersebut dengan jelas di pengadilan. Ketika visum et repertum dibacakan dalam persidangan, penting bagi hakim untuk memiliki pemahaman yang cukup mengenai isi dan makna dari laporan medis yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa terkadang laporan medis yang disusun oleh tenaga medis tidak selalu mudah dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, terutama oleh hakim yang tidak memiliki latar belakang medis. Oleh karena itu, keterlibatan saksi ahli yang kompeten dan mampu menjelaskan isi laporan visum secara sederhana dan mendetail menjadi sangat penting dalam proses pembuktian. Keterangan saksi ahli ini akan membantu hakim dalam memahami lebih baik mengenai keadaan korban, serta menilai apakah laporan visum tersebut relevan dan dapat diterima dalam proses pembuktian.

Keberadaan visum et repertum juga dapat dikatakan memperkuat kedudukan alat bukti lainnya dalam perkara pidana, seperti keterangan saksi atau pengakuan terdakwa. Sebagai contoh, dalam perkara kekerasan fisik, meskipun keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dapat memberikan gambaran mengenai kejadian tersebut, visum et repertum akan memberikan bukti objektif yang menguatkan atau membantah pernyataan tersebut. Dalam beberapa kasus, visum et repertum juga bisa membantu menyelaraskan atau mengonfirmasi keterangan saksi atau terdakwa yang saling bertentangan. Dengan adanya bukti yang kuat dan sah, seperti visum et repertum, proses pembuktian dalam pengadilan menjadi lebih transparan dan tidak mengandalkan spekulasi semata, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan.

Namun, meskipun visum et repertum memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai alat bukti, terdapat juga beberapa tantangan dalam penerapannya dalam praktik. Salah satunya adalah tantangan dalam hal validitas dan keakuratan visum, terutama terkait dengan waktu pemeriksaan yang dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, visum yang diterbitkan beberapa waktu setelah peristiwa pidana dapat mengurangi akurasi hasil pemeriksaan. Luka fisik yang terjadi pada korban bisa saja sudah sembuh, atau korban bisa saja tidak lagi mengalami gejala-gejala tertentu yang relevan, sehingga laporan visum yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya, pengobatan yang dilakukan terhadap korban mungkin sudah mengurangi atau bahkan menghilangkan bukti fisik yang ada. Oleh karena itu, ketepatan waktu dalam penyusunan visum sangat penting untuk menjamin keakuratan dan keberlakuan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah (Hidayat, 2021).



Secara keseluruhan, kedudukan visum et repertum dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia sangatlah penting. Visum et repertum tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang menguatkan dakwaan dalam proses peradilan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dengan memastikan bahwa dampak fisik dan psikologis akibat tindak pidana dapat teridentifikasi secara jelas. Dengan adanya visum et repertum, sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih objektif dan transparan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Meskipun demikian, tantangan yang ada dalam penggunaannya harus terus diatasi melalui peningkatan kualitas tenaga medis, pengawasan yang ketat, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai visum et repertum oleh semua pihak yang terlibat dalam peradilan pidana.

Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Meskipun visum et repertum memiliki kedudukan yang signifikan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat sejumlah tantangan yang sering kali menghambat pemanfaatannya secara optimal. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek teknis penyusunan laporan medis, tetapi juga terkait dengan aspek interpretasi dan penerapannya dalam praktik peradilan. Salah satu tantangan utama adalah kualitas dan kredibilitas laporan visum yang disusun oleh tenaga medis. Dalam banyak kasus, keberhasilan visum et repertum sebagai alat bukti sangat bergantung pada keahlian dan integritas tenaga medis yang terlibat. Laporan medis yang disusun oleh dokter atau ahli medis harus dilakukan dengan standar profesionalisme yang tinggi, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi eksternal, terutama jika melibatkan konflik kepentingan atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Kesalahan atau kelalaian dalam pemeriksaan medis atau penyusunan laporan bisa berakibat fatal bagi jalannya peradilan, bahkan dapat merusak keadilan yang dicari oleh pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, faktor subjektivitas juga menjadi tantangan dalam penggunaan visum et repertum. Walaupun visum et repertum seharusnya bersifat objektif, dalam kenyataannya, interpretasi dari hasil pemeriksaan medis dapat bervariasi tergantung pada pengalaman, pemahaman, dan pendapat tenaga medis yang melakukannya. Dalam beberapa kasus, dokter mungkin memberikan penafsiran yang berbeda mengenai tingkat keparahan luka atau dampak psikologis yang dialami korban. Ketidakepakatan antar tenaga medis dalam menilai hasil pemeriksaan dapat mempengaruhi keputusan pengadilan, karena hakim bergantung pada keterangan saksi ahli dalam menganalisis visum tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian mengenai sejauh mana visum et repertum bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam mendukung dakwaan atau pembelaan (Andriyani, 2017).

Selain masalah kualitas dan interpretasi, tantangan lain yang sering dihadapi dalam penggunaan visum et repertum adalah keterlambatan dalam pengeluaran visum itu sendiri. Pengeluaran visum yang terlambat dapat menurunkan akurasi dan keandalan laporan medis, terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan yang menyisakan luka fisik pada korban. Dalam beberapa kasus, luka fisik pada tubuh korban mungkin sudah sembuh atau menghilang setelah beberapa waktu, sehingga visum yang dikeluarkan setelah jangka waktu tertentu menjadi kurang relevan dan tidak menggambarkan kondisi korban secara akurat. Hal ini berpotensi mengurangi nilai pembuktian visum et repertum di pengadilan, yang tentunya akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil oleh hakim. Oleh karena itu, penanganan yang cepat terhadap kasus yang



melibatkan visum sangat penting agar bukti medis yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, serta tidak terpengaruh oleh faktor waktu yang merugikan.

Selain keterlambatan, adanya kesulitan dalam akses terhadap fasilitas medis yang memadai juga menjadi salah satu tantangan dalam penggunaan visum et repertum. Di beberapa daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil, korban tindak pidana sering kali kesulitan untuk mendapatkan pelayanan medis yang tepat waktu dan berkualitas. Keterbatasan fasilitas dan tenaga medis yang berkompeten dapat menghambat proses pembuatan visum yang akurat dan sah. Hal ini bisa mengakibatkan ketidaktepatan dalam laporan medis yang disusun, yang pada gilirannya dapat melemahkan bukti yang ada di pengadilan. Untuk itu, distribusi fasilitas medis yang lebih merata dan peningkatan pelatihan tenaga medis di seluruh daerah sangat diperlukan agar visum et repertum dapat lebih efektif sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum pidana (Andriyani, 2019).

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah terkait dengan tingkat pemahaman hakim dan aparat penegak hukum terhadap visum et repertum itu sendiri. Dalam banyak kasus, meskipun visum et repertum menjadi alat bukti yang sah, hakim dan penegak hukum lainnya yang tidak memiliki latar belakang medis sering kali kesulitan untuk memahami dan menginterpretasikan laporan medis tersebut dengan baik. Hal ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan, karena hakim mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana sebuah laporan medis bisa mempengaruhi fakta yang ada dalam kasus tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi sistem peradilan untuk melibatkan saksi ahli yang kompeten, yang dapat menjelaskan dengan jelas dan mudah dipahami oleh hakim dan pihak-pihak yang terlibat tentang apa yang terkandung dalam laporan visum.

Lebih jauh lagi, adanya kemungkinan penyalahgunaan visum et repertum untuk kepentingan tertentu juga menjadi tantangan besar dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan tindakan kriminal yang sensitif, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perkosaan, pihak-pihak yang terlibat bisa saja mencoba memanipulasi laporan medis untuk memperkuat argumen mereka. Dalam hal ini, visum et repertum bisa saja digunakan untuk mempengaruhi keputusan pengadilan, meskipun laporan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap proses pembuatan dan penerapan visum et repertum untuk memastikan bahwa bukti medis yang digunakan dalam pengadilan benar-benar sah dan tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tantangan lainnya terletak pada aspek teknis dalam penyusunan visum itu sendiri. Prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan visum sering kali memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai protokol medis dan prosedur hukum yang berlaku. Banyak tenaga medis, terutama di daerah-daerah dengan sumber daya terbatas, mungkin tidak sepenuhnya mengetahui prosedur yang tepat dalam penyusunan visum yang sah. Hal ini bisa mengakibatkan visum yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan oleh hukum, yang pada gilirannya bisa mengurangi efektivitasnya sebagai alat bukti dalam pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada tenaga medis mengenai bagaimana menyusun visum yang sesuai dengan standar hukum dan dapat diterima di pengadilan (Kurniawan, 2020).

Secara keseluruhan, meskipun visum et repertum memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya cukup



kompleks dan beragam. Kualitas dan kredibilitas laporan medis, keterlambatan dalam pengeluaran visum, serta potensi penyalahgunaan dan kesalahan dalam interpretasi laporan medis menjadi beberapa isu utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga medis, pengawasan yang ketat terhadap proses pembuatan visum, serta pemahaman yang lebih baik mengenai visum et repertum dari semua pihak yang terlibat dalam peradilan pidana. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan visum et repertum dapat berfungsi lebih efektif dalam mewujudkan keadilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Visum et repertum memainkan peran yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik dan seksual. Sebagai alat bukti surat, visum et repertum memiliki kedudukan yang sah dalam rangkaian pembuktian perkara pidana, memberikan bukti objektif yang disusun oleh tenaga medis yang kompeten, serta memperkuat proses pencarian kebenaran dan keadilan di pengadilan. Kedudukan ini sangat penting karena visum et repertum tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi fisik korban, tetapi juga dapat mencakup dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dengan demikian, visum et repertum berfungsi sebagai alat yang dapat mendukung dakwaan dan pembelaan dalam proses peradilan, membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta yang relevan untuk putusan, serta memastikan bahwa hak-hak korban terjaga dalam proses hukum. Walaupun memiliki kedudukan yang vital, visum et repertum tetap memiliki tantangan besar dalam hal kualitas laporan, keterlambatan pengeluaran visum, dan potensi interpretasi yang berbeda-beda antar tenaga medis.

Namun, meskipun visum et repertum merupakan alat bukti yang sah dan dapat diandalkan, sejumlah tantangan dan hambatan perlu diatasi agar efektivitasnya dapat optimal. Beberapa tantangan tersebut meliputi kualitas dan kredibilitas laporan medis yang sering kali dipengaruhi oleh faktor subjektivitas, keterlambatan pengeluaran visum yang bisa mengurangi akurasi bukti, hingga kesulitan dalam interpretasi laporan medis oleh pihak pengadilan yang tidak memiliki latar belakang medis. Selain itu, tantangan lain seperti potensi penyalahgunaan visum et repertum untuk kepentingan tertentu dan keterbatasan fasilitas medis di daerah-daerah terpencil juga dapat menghambat optimalisasi penggunaannya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya peningkatan pelatihan tenaga medis, pengawasan yang ketat terhadap pembuatan visum, serta pemahaman yang lebih baik dari hakim dan aparat penegak hukum mengenai penggunaan visum et repertum dalam pembuktian perkara pidana. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, visum et repertum dapat lebih efektif dalam mewujudkan keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, N. "Kredibilitas Visum Et Repertum dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional* 6, no. 4 (2019): 275-290.
- Djamaluddin, S. "Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 245-261.



- Hidayat, A. "Implementasi Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 22, no. 3 (2021): 145-160.
- Kurniawan, R. "Visum Et Repertum dan Tantangan Implementasinya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia* 14, no. 1 (2020): 90-105.
- Mulyana, R. "Visum Et Repertum dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia: Antara Realita dan Harapan." *Jurnal Peradilan Pidana* 7, no. 1 (2018): 20-35.
- Prasetyo, H. "Penerapan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti di Pengadilan Pidana." *Jurnal Pembuktian Pidana* 12, no. 2 (2020): 78-93.
- Samsuddin, F. "Visum Et Repertum dan Kendala Penggunaannya dalam Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 19, no. 2 (2017): 55-70.
- Setiawan, A., & Sundaryanto, A. "Tantangan dalam Penggunaan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 4 (2019): 354-370.
- Utami, D. "Peran dan Fungsi Visum Et Repertum dalam Menjamin Keamanan dan Keadilan bagi Korban Kejahatan." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 34, no. 1 (2020): 112-125.